

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dibahas dalam Bab IV dan sesuai dengan permasalahan yang dikaji, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.

Kondisi sosial masyarakat Tionghoa sebelum terjadinya kerusuhan terlihat baik-baik saja dan tidak mempengaruhi terhadap munculnya aksi kerusuhan pada saat itu. Kondisi sosial terjalin cukup baik yang terlihat dari hubungan interaksi sosial antara penduduk setempat dengan warga Tionghoa. Akan tetapi, hubungan yang sudah terjalin baik itu terkadang mengalami suatu kepincangan ketika sebagian dari warga Etnis Tionghoa di Jatiwangi seringkali membatasi aktivitas pergaulan sehari-hari mereka dengan masyarakat sekitar, terutama masyarakat golongan bawah. Hubungan Etnis Tionghoa dengan masyarakat bawah hanya terjalin sebagai majikan dan karyawan/pembantu/buruh dagang. Etnis Tionghoa lebih akrab dengan penduduk setempat yang berada posisi kalangan atas seperti pengusaha, pejabat dan aparat keamanan karena atas dasar saling menguntungkan. Kondisi ekonomi masyarakat Tionghoa sebelum terjadinya kerusuhan nampaknya secara langsung mempengaruhi terhadap munculnya aksi kerusuhan pada saat itu karena antara masyarakat Jatiwangi dengan warga Etnis Tionghoa mengalami perbedaan dalam segi kondisi ekonomi. Perbedaan tersebut sangat terlihat dari keadaan ekonomi warga Tionghoa di Jatiwangi yang mengalami kemajuan dan berada pada tingkat ekonomi yang baik. Sedangkan, kondisi ekonomi masyarakat Jatiwangi terutama kalangan bawah mengalami keterpurukan akibat dari kenaikan harga kebutuhan pokok. Hal itu menimbulkan kecemburuan ekonomi dari masyarakat Jatiwangi.

Kerusuhan yang terjadi di Jatiwangi dilatarbelakangi beberapa faktor penyebab terjadinya kerusuhan, yakni: kesenjangan ekonomi di masyarakat, rendahnya sikap toleransi warga Etnis Tionghoa, kelangkaan kebutuhan pokok masyarakat, dan pembubaran massa secara paksa oleh aparat. Faktor-faktor

penyebab tersebut memiliki hubungan yang saling berkaitan dalam memunculkan aksi kerusuhan di Jatiwangi pada saat itu.

Kerusuhan anti Etnis Tionghoa di Jatiwangi terjadi selama tiga hari berturut-turut terhitung sejak hari Kamis tanggal 12 Februari 1998 sampai hari Sabtu tanggal 14 Februari. Kerusuhan ini diprovokasi atau digerakkan oleh kelompok Zoker yang secara penuh memegang kontrol yang sangat dominan terhadap jalannya kerusuhan di Jatiwangi. Kelompok ini memiliki otoritas dan kepentingan yang berbeda pada kerusuhan tersebut. Keterlibatan mereka hanya untuk memproklamirkan atau melegitimasi jati diri mereka sebagai kelompok penguasa di daerah Jatiwangi. Massa yang terlibat dalam kerusuhan merupakan gabungan dari masyarakat sekitar Jatiwangi dengan masyarakat dari luar Jatiwangi. Masyarakat setempat yang terlibat dalam kerusuhan tersebut adalah masyarakat yang tergolong ke dalam masyarakat golongan bawah yang tingkat ekonomi rendah. Dari penelitian yang dilakukan, sebagian besar dari masyarakat golongan bawah yang terlibat adalah masyarakat yang berprofesi sebagai tukang becak dan buruh. Hal tersebut memperlihatkan bahwa faktor kesenjangan ekonomi menjadi faktor penyebab terjadinya kerusuhan di Jatiwangi.

Upaya pemerintah dalam mengatasi kerusuhan di Jatiwangi pada saat itu terlihat kurang. Hal itu disebabkan jumlah personil keamanan yang ditugaskan untuk mengatasi kerusuhan sangatlah sedikit, tidak sebanding dengan jumlah perusuh yang sangat banyak. Selain itu, pola gerakan dari massa perusuh pun sangatlah spontan dan cepat, sehingga aparat keamanan merasa kewalahan dalam mengahalui aksi kerusuhan yang dilakukan oleh masa. Akan tetapi, setelah mendapatkan bantuan dari Brimob, Korem 063 Sunan Gunungjati Cirebon dan Arhanudse 14 Plumbon Cirebon aksi kerusuhan bisa dengan cepat diatasi. Upaya lainnya dari pemerintah adalah lebih bersifat umum yakni dengan dikeluarkannya surat DPA Nomor: 40/DPA/1998 mengenai upaya pemantauan dan pengendalian krisis dan Instruksi Presiden Nomor 26 Tahun 1998 mengenai perwujudan persamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan, persamaan hak atas pekerjaan dan penghidupan, hak dan kewajiban warga negara, dan perlindungan

hak asasi manusia, serta memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa. Upaya tersebut dikeluarkan dalam rangka untuk menghapuskan segala diskriminasi atau pembedaan dalam segala bentuk kepada warga negara Indonesia, baik atas dasar suku, agama, ras maupun asal-usul.

Hikmah dari kerusuhan yang terjadi di Jatiwangi ialah bahwa masyarakat harus lebih bijak dan dewasa lagi dalam mengambil keputusan. Sebab, keputusan yang didasari atas dasar emosi dan akal yang tidak sehat malah berdampak negatif terhadap seluruh lapisan masyarakat. Selain itu, perbedaan-perbedaan dalam masyarakat, baik itu perbedaan secara kultur budaya, sosial, maupun ekonomi dari para pendatang atau bahkan pribumi sendiri tidak lah harus menjadi sebuah alasan dalam terjadinya suatu kerusuhan atau konflik.

5.2 Saran

1. Bagi warga Etnis Tionghoa

Saran bagi warga Etnis Tionghoa, hendaknya kebudayaan, adat istiadat serta ciri lainnya yang dimiliki dileburkan ke dalam kehidupan sosial-budaya masyarakat Indonesia. Sebab, pembauran secara sosial-budaya dengan meleburnya budaya para pendatang ke dalam budaya bangsa Indonesia akan memperkuat kita sebagai bangsa yang majemuk. Selain itu, warga Etnis Tionghoa sendiri harus memiliki sifat dan sikap menghormati terhadap kultur budaya suatu bangsa, seperti dalam pepatah “dimana bumi dipijak, di situ langit dijunjung”.

2. Bagi masyarakat Jatiwangi

Saran bagi masyarakat Jatiwangi, hendaknya dalam kehidupan sehari-hari hilangkan prasangka-prasangka buruk terhadap seluruh warga keturunan Tionghoa yang seolah-olah semuanya merupakan sebagai perusak bangsa dan negara. Sebab, prasangka-prasangka buruk ini akan meng-Tionghoa-kan kembali warga keturunan Tionghoa yang sudah berorientasi pada kehidupan masyarakat Indonesia dewasa ini. Selain itu, di bidang perekonomian, harus menjadikan dorongan semangat bagi masyarakat pribumi untuk bangkit kembali menguasai

sektor perdagangan atau kewiraswastaan masyarakat pribumi seperti masa-masa dahulu ketika sebelum para pedagang Belanda datang ke Indonesia awal abad 16, yang dimana pada masa itu bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa yang menguasai perdagangan nusantara.

3. Bagi pemerintah

Saran bagi pemerintah, hendaknya harus lebih serius lagi dalam rangka usaha pembinaan kesatuan dan persatuan bagi masyarakat Indonesia. Sikap diskriminasi karena perbedaan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, dan warna kulit antara sesama Warga Negara Indonesia (WNI) harus dihilangkan dalam proses pelaksanaan usaha pembinaan kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia. Menyadari masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang multikultur, namun sikap diskriminasi atau membeda-bedakan satu sama lain bukan sikap yang dewasa dalam mengatasi persoalan-persoalan yang terjadi di Indonesia. Indonesia dikenal sebagai negara Bhineka Tunggal Ika yang tidak mengenal golongan apapun untuk tetap satu. Selain itu juga etos masyarakat Indonesia yang mempunyai etos kerja bergotong royong merupakan sebuah modal bagi Indonesia untuk menjadi negara multikultur yang maju didalam segala bidang kehidupan.

4. Bagi dunia pendidikan

Saran bagi dunia pendidikan, hendaknya para pengajar atau guru terutama guru-guru Sejarah dalam proses pembelajaran tidak hanya berorientasi terhadap materi pelajaran yang disampaikan. Namun, para guru Sejarah harus menerapkan nilai-nilai moral Pancasila melalui pendidikan multietnis. Pendidikan multietnis sangatlah penting untuk diajarkan kepada siswa terutama untuk pendidikan berkarakter pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial. Hal itu bertujuan agar siswa menyadari bahwa Indonesia memiliki berbagai etnis dan suku bangsa yang memiliki kebudayaan dan adat istiadat yang berbeda-beda sehingga kerusuhan-kerusuhan yang terjadi pada etnis-etnis yang ada di Indonesia tidak terjadi lagi

dan prasangka-prasangka antar etnis bisa teratasi dengan ikatan Bhineka Tunggal Ika. Dengan begitu diharapkan kerusuhan-kerusuhan antar etnis yang terjadi dikemudian hari tidak terulang kembali. Sebab, salah satu ciri dari manusia bijak ialah dapat berkaca terhadap kejadian atau peristiwa yang terjadi di masa lampau dan dapat mengambil hikmah dari setiap kejadian supaya tidak mengulangi kejadian yang sama yang berakibat buruk terhadap kehidupan di masa yang akan datang.

5. Bagi peneliti selanjutnya

Keterlibatan Kelompok Zoker di dalam kerusuhan masih sedikit dibahas oleh peneliti. Terutama mengenai peranan kelompok Zoker sebagai kelompok penguasa di Jatiwangi terhadap munculnya aksi kerusuhan di Jatiwangi pada Februari 1998. Hal itu dapat dijadikan sebagai bahan rekomendasi bagi peneliti selanjutnya.